



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

TAHUN 2021

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, berkat limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan dengan baik. LKjIP ini disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah, serta Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja, mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggung-jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya, pelaksanaan kebijakan, dan program dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah secara periodik untuk mengetahui dan menilai kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam melaksanakan kegiatan perencanaan dan tupoksinya serta menjadi bahan evaluasi dan pedoman bagi peningkatan kinerja pada tahun-tahun berikutnya.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021, merupakan wujud pertanggungjawaban Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu terhadap capaian kinerja sasaran, program maupun kegiatan yang telah ditetapkan untuk dicapai dalam Tahun 2021 beserta realisasinya, yang pada prinsipnya memuat laporan tentang capaian kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2021. Yang diarahkan bagi pemenuhan target yang telah ditetapkan. Analisis kemudian dilanjutkan dengan melakukan identifikasi permasalahan dan strategis penanganan dalam rangka perbaikan capaian kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu pada tahun-tahun mendatang.



Akhirnya, semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 ini bermanfaat dan dapat dijadikan parameter terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan pembangunan Tahun 2021.

Kotamobagu, 25 Februari 2022

**KEPALA DINAS PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELAURAG
BERENCANA
KOTA KOTAMOBAGU**



**AHMAD YANI UMAR, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19720826 199303 1006**

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
IKHITISAR EKSSEKUTIF	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tugas, Fungsi	1
1.3 Struktur Organisasi.....	1
1.4 Sumber Daya Manusia.....	4
1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.....	8
2.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra	10
2.2 Indikator Kinerja Utama	10
2.3 Perjanjian Kinerja	11
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.1.1 Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2021	13
3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	15
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA).....	19
3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	20
3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	22
3.1.6 Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.....	23
3.2 Realisasi Anggaran	28
BAB IV PENUTUP.....	33

DAFTAR TABEL

Nomor	Judul	Hal.
Tabel I.1	Daftar Nominatif Pegawai Negeri Sipil	4
Tabel I.2	Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan	5
Tabel I.3	Aspek Strategis	6
Tabel I.4	Isu - Isu Strategis	7
Tabel II.1	Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Perubahan	8
Tabel II.2	Tujuan dan Sasaran Renstra	10
Tabel II.3	Indikator Kinerja Utama	10
Tabel II.4	Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan	11
Tabel II.5	Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12
Tabel III.1	Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021	13
Tabel III.2	Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019	15
Tabel III.3	Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra	19
Tabel III.4	Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	22
Tabel III.5	Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja	25
Tabel III.6	Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dinas PP dan KB	28

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021, merupakan gambaran dari capaian kinerja yang dilaksanakan periode Tahun 2021 yang mengacu pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Selanjutnya sesuai Rencana Kinerja Tahun (RKT) dan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu menetapkan 3 (tiga) Sasaran Strategis dan merupakan Indikator Kinerja Utama, Sasaran Strategis tersebut antara lain sebagai berikut:

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2021
Meningkatnya Kualitas Keluarga	Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55%
	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	64%
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks iBangga	0

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas PP dan KB Kotamobagu Tahun 2019-2023

Tahun 2021 merupakan Tahun Ketiga yang ingin diwujudkan capaian kinerjanya sesuai dengan Perubahan Renstra Tahun 2019-2023. Secara umum hasil capaian kinerja Bappelitbangda Kota Kotamobagu telah menunjukkan kinerja yang baik. Berdasarkan analisis capaian kinerja, gambaran pencapaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 sebagai berikut :

1. Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) telah tercapai dengan realisasi 0,4%.
2. Persentase Pemakaian Kontrasepsi Modern telah tercapai dengan realisasi 86,43%
3. Indeks iBangga untuk tahun 2021 belum ada target dan realisasi dikarenakan indikator ini baru ditetapkan pada Renstra Perubahan Dinas PP dan KB Tahun 2019 - 2023, sesuai hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap pencapaian indikator Pemerintah Daerah.

Pencapaian kinerja Tahun 2021 tercapai melalui koordinasi dan sinkronisasi dengan bidang - bidang terkait serta didukung dengan sumber daya manusia yang memadai dan keuangan yang cukup.

Keberhasilan pencapaian target kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 didukung oleh beberapa faktor baik internal maupun eksternal dalam wujud kerjasama dan *team work* dengan OPD yang terkait di Lingkungan Pemerintah Kota Kotamobagu. Kendala dan hambatan yang ditemui dalam mewujudkan target Kinerja yang telah diperjanjikan telah diminimalisir dampaknya dengan melakukan beberapa upaya untuk hasil yang optimal.

Adapun strategi peningkatan kinerja untuk tahun-tahun berikutnya disusun melalui Rencana Kerja Tahunan dan Rencana Aksi Program, Kegiatan, Sub Kegiatan per Triwulan.

Kotamobagu, 25 Februari 2022

**KEPALA DINAS
PENGENDALIAN PENDUDUK
dan KELUARGA BERENCANA
KOTA KOTAMOBAGU**



**AHMAD YANI UMAE, SE
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19780826 199303 1 006**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2021 ini adalah wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Instansi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sekaligus bentuk pertanggungjawaban dari perencanaan kinerja, pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran selama Tahun Anggaran 2021.

1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu merupakan unsur pelaksana Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Walikota dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi di bidang Pengendalian Penduduk serta kegiatan Keluarga Berencana.

Tugas pokok dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu mengacu pada Peraturan Walikota Kota Kotamobagu Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tipe B.

1.3. Struktur Organisasi.

Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

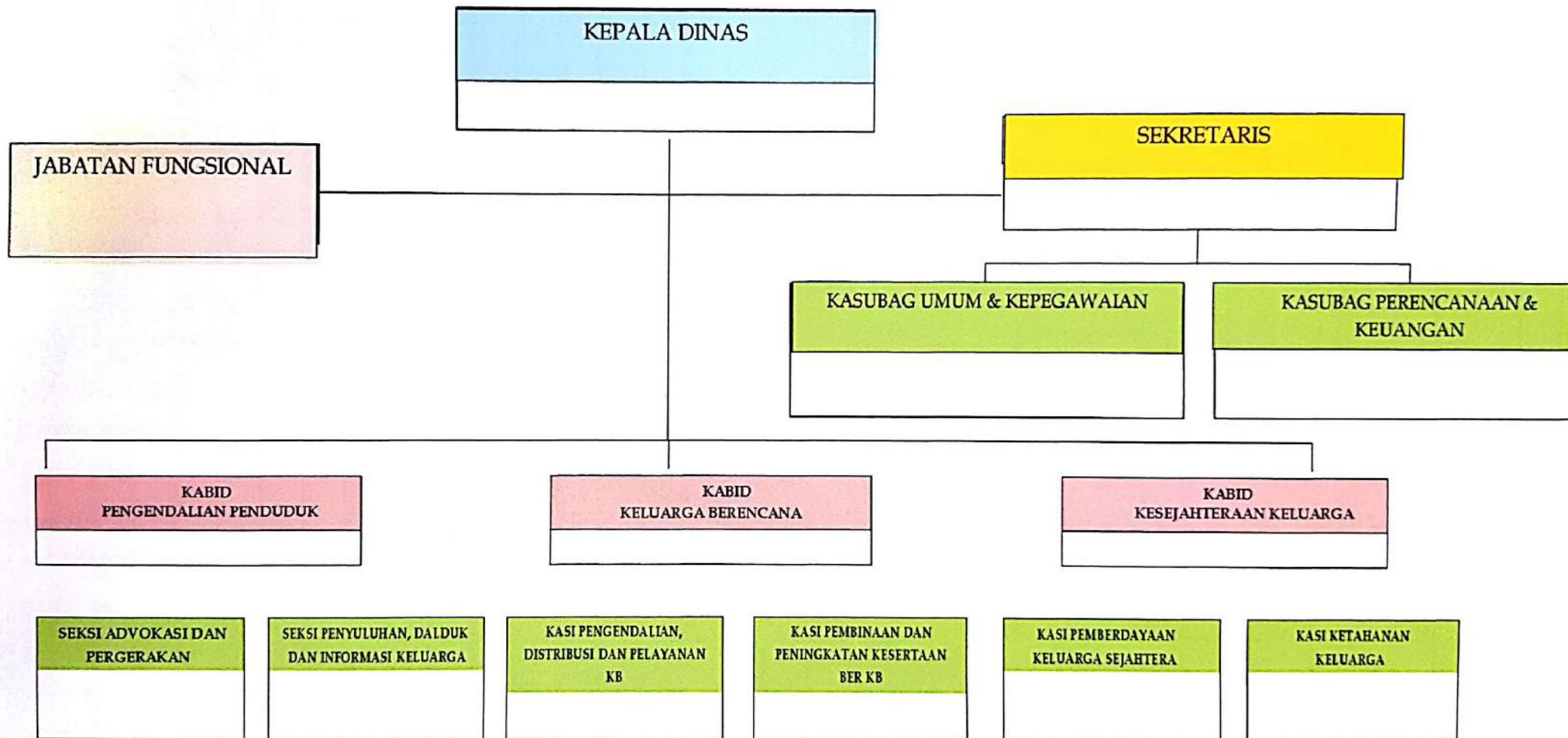
1. Kepala Dinas
2. Sekretaris (Membawahi 2 (dua) sub bagian terdiri dari :
 - a. Kepala sub Bagian umum dan Kepegawaian
 - b. Kepala Sub Bagian perencanaan dan Keuangan
3. Kepala Bidang Bidang Pengendalian Penduduk :
 - a. Kepala Seksi Advokasi dan Pergerakan;
 - b. Kepala Seksi Penyuluhan, Pengendalian Penduduk dan informasi Keluarga;

4. Bidang Kelurga Berencana :
 - a. Kepala Seksi Pengendalian, Distribusi, dan Pelayanan KB;
 - b. Kepala Seksi Pembinaan dan Peningkatan Kesetaraan ber - KB;
5. Kepala Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga,
 - a. Kepala seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera
 - b. Kepala Seksi Bina Ketahanan Keluarga
6. Kelompok jabatan fungsional.

Gambar susunan organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dapat dilihat seperti berikut :

**SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB
KOTA KOTAMOBAGU**

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR : 5 TAHUN 2016



1.4. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia adalah faktor sentral dalam suatu institusi / organisasi. Apapun bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kepentingan manusia dan dalam pelaksanaan misinya dikelola dan diurus oleh manusia yang merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan institusi.

Kondisi institusi/organisasi akan sangat dipengaruhi dan tergantung pada kualitas serta kemampuan kompetitif sumber daya manusia yang dimilikinya.

Komposisi dan jumlah pegawai Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu berdasarkan tingkat pendidikan, pangkat dan golongan menduduki jabatan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel I.1

**DAFTAR NOMINATIF PEGAWAI NEGERI SIPIL
BERDASARKAN GOLONGAN RUANG DAN JENIS KELAMIN**

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang KB		Bidang KS		Bidang Dalduk		Jumlah		Total
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
I/a											
I/b											
I/c											
I/d											
II/a											
II/b											
II/c		2							2		2
II/d											
III/a											
III/b											
III/c		2	1	1		1		1	1	5	6
III/d			1	1		1		1	1	3	4
IV/a						3		2		5	5
IV/b	1	1							1	1	2
IV/c											
IV/d											
IV/e											
JUMLAH	1	5	2	2		5		4	3	16	19
TOTAL	6		4		5		4		19		

Tabel I.2
Komposisi PNS Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Golongan

No	Jabatan	Pendidikan
1	Kepala Dinas	S1
2	Sekretaris	S1
3	Kabid. Pengendalian Penduduk, penyluhan dan pergerakan	S1
4	Kabid. Keluarga Berencana	S1
5	Kabid ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	S1
6	Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	S1
7	Kasubbag. Perencanaan dan Keuangan	S1
8	Kasie Advokasi dan Pergerakan	S1
9	Kasie Penyluhan Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga	S1-
10	Kasie Pengendalian, Distribusi dan Pelayanan KB	S1
11	Kasie Pembinaan dan Peningkatan Kesertaan ber – KB	S1
12	Kasie Pemberdayaan dan Keluarga Sejahtera	S2
13	Kasie Bina Ketahanan Keluarga	S1
14	Koordinator UPTD-KB Ktg Utara	S1
15	Koordinator UPTD-KB Ktg Timur	S1
16	Koordinator UPTD-KB Ktg Barat	S1
17	Koordinator UPTD-KB Ktg Selatan	S1
18	Deisi Arisandi Latamu, SKM	S1
19	Ririn Kahard	SMA
20	Prisilia Veranda Tampi	SMA
21	Meida V. Damopolii, SE	Sarjana
22	Hamka Lomamay	D3
23	Sulpalia Paputungan	Sarjana

Berdasarkan data pada tabel di atas, diketahui bahwa Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu memiliki jumlah pegawai yang terbatas dengan berbagai disiplin ilmu. Untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi pegawai di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, perlu dilakukan pelatihan dan pengembangan kemampuannya, selain itu jumlah pegawai juga harus bertambah.

1.5 Aspek Strategis dan Isu Strategi

Aspek strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel I.3
Aspek Strategis

Permasalahan	Faktor Penghambat	Faktor Pendukung
Masih tingginya angka Total Fertility Rate (TFR)	Penggunaan kontrasepsi non MKJP yang masih tinggi	Tersedianya alokon MKJP, tersedianya mobil pelayanan KB
Masih rendahnya Presentse peserta KB aktif	PUS yang ingin anak segera, ingin anak tunda dan tidak ingin anak lagi yang tidak ber-KB	Tersedianya alokon MKJP, tersedianya mobil pelayanan KB
Masih tingginya rata – rata usia kawin pertama wanita	Undang – Undang No 1 Tahun 1974 dan adanya kehamilan yang tidak diinginkan	Pembentukan kelompok PIK-R jalur pendidikan dan jalur kemasyarakatan serta terbentuknya sekolah siaga kependudukan
Masih rendahnya presentase penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	Minat terhadap kontrasepsi MKJP tertentu masih tinggi (implant) dibandingkan kontrasepsi MKJP yang lain serta tenaga medis terlatih masih kurang	Tersedianya alokon MKJP selain implant cukup banyak serta tidak tersedianya anggaran pelatihan khusus tenaga medis teknis
Masih rendahnya anggota BKB,BKL dan BKL yang ber-KB	Masih rendahnya pemahaman keluarga tentang tumbuh kembang anak balita, tumbuh kembang anak remaja dan lansia yang tangguh, sehat dan mandiri serta dukungan tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat masih kurang. Dukungan anggaran khusus honorarium kader dan pelatihan kader sangat rendah	Wilayah terjangkau, tersedianya sarana KIE BKB,BKL KIT posyandu balita dan lansia, kelompok bermain, PAUD serta terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R)
Belum tersedianya tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan	Belum tersedianya dukungan anggaran untuk tenaga teknis Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	Telah terbentuknya Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) disetiap Kecamatan dan Kampung KB serta terbentuknya kelompok ketahanan keluarga
Masih kurangnya pembentukan dan pembinaan kelompok PIK-R	Pemahaman tentang pentingnya PIK-R masih rendah terutama pada jalur kemasyarakatan serta sarana dan prasarana pendukung masih kurang	Terbentuknya Pusat Informasi Konseling Remaja (PIK-R) melalui jalur pendidikan dan terpilihnya Duta GENRE sebagai motivator dan terbentuknya forum GENRE

Masih kurangnya tenaga PKB/PLKB yang didayagunakan	Terdapat beberapa kelurahan yang berpenduduk banyak, ratio petugas lapangan (PKB/PLKB) yang tidak sesuai dengan jumlah Desa dan Kelurahan dan tidak adanya kewenangan Daerah dalam rekrutmen Tenaga Penyuluh KB	
Masih rendahnya anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB mandiri	Pengelolaan kelompok UPPKS pada umumnya masih bersifat perorangan. Pembinaan KB oleh pengelola UPPKS masih kurang	Banyaknya kelompok UPPKS yang ada
Kendala penyediaan dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi	Pengiriman alat dan obat kontrasepsi dari Provinsi yang terkadang tidak sesuai waktu dan tidak sesuai kebutuhan	Tersedianya alokon mandiri di apotik dan faskes swasta
Masih adanya faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang belum bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	Masih terdapat beberapa faskes swasta yang belum bekerjasama dengan BPJS sehingga mekanisme klaim cukup rumit	Tersedianya faskes pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS serta mobil pelayanan KB secara gratis oleh Dinas PP dan KB.
Belum terupdatenya penyediaan informasi data mikro keluarga disetiap Desa dan Kelurahan	Anggaran pendataan data mikro keluarga yang tidak tersedia setiap tahun.	Wilayah yang terjangkau, tenaga petugas pendata yang tersedia disetiap Desa dan Kelurahan serta kebutuhan data keluarga oleh pemangku kepentingan

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas PP dan KB Tahun 2021-2022

Tabel I.4
Isu – Isu Strategis

NO	Isu Isu Strategis
1	Laju pertumbuhan penduduk
2	TFR tinggi belum mendukung penduduk tumbuh seimbang
3	Peran serta KB pria masih kurang
4	Perlunya pemutakhiran data dan informasi yang akurat untuk kepentingan peta operasional penganggaran program
5	Kurangnya informasi data keluarga pada setupa keluarga
6	Masih tingginya Unmet Need
7	Dukungan anggaran yang masih terbatas
8	Terbatasnya akses informasi remaja putus sekolah tentang kesehatan reproduksi
9	Masih kurangnya pembentukan pengembangan Pusat Konseling dan KRR yang ada disekolah maupun diluar sekolah
10	Kurangnya pembinaan kepada kelompok UPPKS, BKB, BKR dan BKL untuk peningkatan ketahanan keluarga

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas PP dan KB Tahun 2021-2023

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Rencana Strategis Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu merupakan dokumen rencana dan berfungsi mengarahkan pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam jangka 5 (Lima) tahun kedepan, yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi serta berpedoman pada RPJMD Kota Kotamobagu dan bersifat indikatif.

Renstra Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dijadikan tolak ukur dalam pencapaian Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dengan harapan capaian Renstra dapat memenuhi sasaran Renstra BKKBN dan Renstra BKKBN Perwakilan Sulawesi Utara, sebagai ukuran baik tidaknya perencanaan program, kegiatan dan pendanaan, sumberdaya penyelenggaraan pendanaan, prosedur mekanisme pelayanan dan strategi pelayanan yang ditempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu.

Agenda pembangunan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu tahun 2019-2023 yang dituangkan dalam Renstra, lebih menitikberatkan kepada upaya pengendalian penduduk serta upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga menuju harapan yaitu penduduk Kota Kotamobagu yang tumbuh seimbang dan sejahtera.

Renstra perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dalam kurun waktu 3(Tiga) tahun kedepan berupaya menekan laju pertumbuhan penduduk melalui pencapaian menurunnya angka kelahiran pada wanita usia subur 15 – 49 tahun atau Total Fertility Rate (TFR) dan menurunnya angka kelahiran wanita usia subur 15-19 tahun atau Age Specific Fertility Rate (ASFR) melalui program pelayanan KB yang optimal dan terukur, meningkatkan median usia kawin wanita melalui kegiatan Pusat Informasi Konsultasi Remaja (PIK-R) baik jalur pendidikan maupun jalur kemasyarakatan serta upaya pembangunan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dalam rangka turut memberikan andil dalam pencapaian Visi Misi Pemerintah Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023.

Tabel II.1
Perbandingan Rencana Strategis Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum								Sesudah							
Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran Renstra	Satuan	2021	2022	2023	Target Akhir RPJMD
Terwujudnya laju pertumbuhan penduduk	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif (CPR)	%	80	80	80	80	Terwujudnya keluarga yang berkualitas	Menurunnya angka kelahiran	Laju pertumbuhan penduduk	%	1,55	1,50	1,45	1,45
		Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	%	2,7	2,4	2,4	2,4		Meningkatnya angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	Presentase pemakaian kontrasepsi Modern	%	64	67	70	70

									modern / Modern Contracep tive Pravalenc e Rate (MCPR)						
		Meningkat kan media usia kawin pertama	%	22	22	22	22		Meningkat nya Indeks Pembangu nan Keluarga	Indeks I- Bangga	Nilai	0	Nil ai 48	Nil ai 60	Nilai 65
		Presentas e keluarga yang didata	%	10 0	10 0	10 0	100								
		Presentas e PPKBD	%	11 8	11 8	11 8	118								
		Presentas e layanan terhadap remaja tentang reproduksi melalui PIK-R	%	75	84	10 0	100								
Terwaju dnya peningk atan Ketahan an Keluarg a	Meningktn ya Ketahanan Keluarga	Presentas e PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB	%	80	80	80	80								

Sumber Data : Renstra DPPKB Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023 sebelum dan sesudah perubahan

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu pada tahun 2021 melakukan revisi (perubahan) Renstra. Perubahan Renstra ini ada beberapa perubahan pada sasaran dan indikator sasaran Renstra sebagai berikut :

1. Tujuan Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah "**Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas**". Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah, yang mempunyai ciri-ciri sejahtera, sehat maju dan mandiri serta memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan luas dan bertanggung jawab.
2. Menurunnya angka kelahiran dengan indikator laju pertumbuhan penduduk. Sasaran dan indikator ini berupa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti. Pencapaian indikator sasaran ini adalah menekan laju pertumbuhan penduduk.
3. Meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern / Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR) dengan indikator presentase pemakaian kontrasepsi modern. Pencapaian indikator ini yaitu presentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi modern dan meningkatnya kesertaan ber-KB.
4. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga dengan indikator Indeks I-Bangga dimana pencapaian indikator ini pengukuran kualitas keluarga yang ditujukan melalui tiga dimensi yaitu dimensi ketentraman, kemandirian dan kebahagiaan keluarga. Yang mana hasil pengukuran yaitu capaian pelaksanaan pembangunan keluarga disuatu wilayah yang diklasifikasikan menjadi tangguh berkembang dan rentan.

2.1.1 Tujuan dan Sasaran Renstra

Tujuan dan sasaran sebagaimana termuat dalam Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019 -2023, dirumuskan berdasarkan misi kesatu Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu yaitu **Meningkatkan Kualitas Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Modal Sosial Melalui Pemberdayaan Masyarakat.**

Uraian tujuan dan sasaran Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kota Kotamobagu dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. II.2
Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran
Terwujudnya Keluarga Yang Berkualitas	Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk
	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/ Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern
	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks i-Bangga

Sumber Data : Renstra Perubahan Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu Tahun 2019-2023

2.2 Indikator Kinerja Utama

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penetapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Adapun penetapan target Indikator Kinerja Utama Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu adalah sebagai berikut :

Tabel II.3
Indikator Kinerja Utama

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	RUMUS	SATUAN
	TERWUJUDNYA KELUARGA YANG BERKUALITAS	MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	$P_t = P_o + (L - M) + (I - E)$	% (PRESENTASE)
		MENINGKATNYA ANGKA PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN /MODERN CONTRACEPTIVE PRAVALENC RATE (MCPR)	PRESENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN	$\frac{\text{JUMLAH PESERTA KB AKTIF MODERN}}{\text{JUMLAH PASANGAN USIA SUBUR}} \times 100\%$	% (PRESENTASE)
		MENINGKATNYA KETAHANAN KELUARGA	INDEKS IBANGGA	INDEKS	NILAI

Sumber Data: SK IKU Perubahan DPPKB Kota Kotamobagu Tahun 2021

2.3 Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.4
Perbandingan Perjanjian Kinerja Sebelum dan Sesudah Perubahan

Sebelum			Sesudah			
Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2021		Sasaran Strategi	Indikator Kinerja	Target 2021
Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif (CPR)	80%		Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55%
	Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	2,1%		Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modren Contraceptive Pravalance (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	64%
	Meningkatkan Media Usia Kawin Pertama	Usia 22		Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Indeks i Bangga	0
	Presentase Keluarga Yang Didata	100%				
	Presentase PPKBD	118%				
	Presentase Layanan Terhadap Remaja Tentang Reproduksi Melalui PIK-R	75%				
Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Presentase PUS Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB	80%				

Sumber Data : PK Tahun 2021 Sebelum dan Sesudah Perubahan

Penjelasan pada tabel diatas Perjanjian Kinerja Perubahan dalam strategi mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (program, kegiatan, alokasi anggaran). Pengaruh pencapaian tujuan dan sasaran dikarenakan ada penyesuaian regulasi dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk mendukung Perjanjian Kinerja, maka Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu menetapkan 3 (Tiga) program pada Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel II.5
Program Pendukung Perjanjian Kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021

NO	PROGRAM	ANGGARAN SEBELUM PERUBAHAN (Rp)	ANGGARAN SESUDAH PERUBAHAN (Rp)	KET
1	Pengendalian Penduduk	189.905.800	120.925.400	
2	Pembinaan Keluarga Berencana	2.240.576.690	2.227.048.990	
2	Pemberdayaan dan Peningkatan Kesejahteraan Keluarga	86.688.000	30.135.000	

Adapun program – program pendukung tersebut diatas untuk pelaksanaan Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan, sedangkan untuk penganggaran Perjanjian Kinerja sebelum dan sesudah perubahan mengalami perubahan anggaran dari Rp. 2.517.170.490 menjadi Rp. 2.440.089.790. Dari pelaksanaan ketiga program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu selang waktu Tahun Anggaran 2021 terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 213.908.500 akibat kebutuhan anggaran penanganan pandemi Covid-19.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi pencapaian kinerja tahun 2021 dengan target pencapaian indikator kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam kinerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021. Capaian kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan/kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang istem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 Tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Indikator kinerja sasaran Tahun 2021 untuk Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu dpat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2021		
			TARGET	REALI-SASI	CAPAIAN KINERJA
	MENURUNNYA ANGKA KELAHIRAN	LAJU PERTUMBUHAN PENDUDUK	1,5	0,4	25,8%
	MENINGKATNYA ANGKA PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN / MODERN CONTRACEPTIVE PRAVALENCE RATE (MCPR)	PRESENTASE PEMAKAIAN KONTRASEPSI MODERN	64	86,43	135%
	MENINGKATNYA INDEKS PEMBANGUNAN KELUARGA	INDEKS IBANGGA	0	0	0%

Dari tabel diatas dapat dijelaskan penjabaran atas pencapaian dari masing – masing sasaran strategis berserta indikatornya sebagai berikut :

1. **Menurunnya Angka Kelahiran**

TFR adalah singkatan dari Total Fertility Rate atau Angka Kelahiran Total. TFR mengidentifikasi rata – rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita usia subur disuatu wilayah daerah tertentu . Seperti diatas menyebutkan bahwa TFR Kota Kotamobagu tahun 2021 target awal 1,55 dan realisasi 0,4 artinya Rata –rata anak yang dilahirkan selama masa usia subur (usia 15 -49 tahun) adalah 0 – 4.

Ini menunjukkan angka TFR di Kotamobagu dari tahun ketahun mencapai Target. Keberhasilan suatu daerah dalam rangka mengendalikan jumlah penduduk melalui Program Keluarga Berencana dalam hal ini TFR 0,4 merupakan angka capaian ideal untuk mencapai Penduduk tumbuh seimbang.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah :

- (1) Adanya pendekatan yang baru dalam menyadarkan masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat.
- (2) Tingkat pendapatan dan juga pendidikan dan penggunaan alat kontrasepsi dan tingkat urbanisasi
- (3) Tingkat kesehatan yang diawali dengan angka harapan hidup dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15 -49 tahun yang berstatus kawin. Upaya ini dicapai dengan meningkatkan pemakaian kontrasepsi (CPR)
- (4) Menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet Need),
 - a. Menurunkan angka kelahiran dikelompok umur remaja usia 15 -19 tahun,
 - b. Menurunnya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan perempuan usia subur.

Dinas PP dan KB tetap berupaya untuk memenuhi alat dan obat kontrasepsi dan mengintegrasikan pelayanan KB secara rutin, juga terus menghimbau pentingnya ber KB bagi keluarga muda yang baru menikah untuk merencanakan periode memiliki anak memperhatikan jarak antara kelahiran dan waktu yang tepat berhenti memiliki anak.

Dalam satu keluarga sangat dianjurkan untuk tidak memiliki dua balita karena itu pasangan muda yang baru melahirkan disarankan untuk segera menggunakan alat kontrasepsi (kontrasepsi jangka panjang).

2. Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR).

Presentase pemakaian kontrasepsi modern / Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR) merupakan tingkat pemakaian alat kontrasepsi baik Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ataupun Non Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (Non MKJP). Tingkat capaian kinerja untuk indikator ini ditargetkan sebesar 64 % dengan realisasi sebesar 86,43 % dari target yang telah ditetapkan. Hal ini dikarenakan jumlah pemakaian kontrasepsi modern (IUD,MOW,MOP,IMP,Kondom,STK dan Pil) di Kota Kotamobagu pada tahun 2021 adalah 17.840 Akseptor dari seluruh peserta KB Aktif yang berjumlah 20.554 Akseptor. Untuk pencapaian indikator ini pada tahun 2021 mengalami kenaikan dibandingkan dengan pencapaian pada Tahun 2020 sebesar 83,16 % dengan jumlah akseptor 16.865 dari 2.280 peserta KB Aktif.

Adapun upaya yang dilakukan untuk pencapaian target indikator ini adalah :

- (1) Tersedianya pelayanan KB gratis yang dilakukan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana bekerjasama dengan faskes-faskes pemerintah dan swasta.
- (2) Tersedianya Alat dan Obat Kontrasepsi MKJP dan pelayanan KB mobile
- (3) Adanya dukungan pemerintah dan masyarakat tentang pembentukan Kampung KB yang dapat menunjang program KKBPK.
- (4) Tersedianya sarana dan prasarana di Balai KKBPK untuk meningkatkan pelayanan KB
- (5) Tersedianya sarana dan prasarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)

3. Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga

Program ketahanan keluarga merupakan upaya untuk mewujudkan peningkatan kesejahteraan dan membina ketahanan keluarga. Implementasi dari ketahanan keluarga akan menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia yang tangguh. Ketangguhan sumber daya tersebut akan menjadi modal besar bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Oleh karena itu sangat penting Pembinaan anggota Keluarga kelompok BKB, BKR, BKL, GENRE, UPPKS dan PPKS di wilayah Kotamobagu melalui sosialisasi kebijakan ketahanan keluarga dengan adanya pembinaan secara berkesinambungan terhadap kelompok kegiatan. Dengan terlaksanannya kegiatan ini maka program ketahanan keluarga dapat berjalan dengan baik dan indikator sasaran indeks pembangunan keluarga dapat tercapai sehingga keluarga yang berkualitas dan sejahtera dapat terwujud di Kota Kotamobagu.

3.1.2 Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 Dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019.

Perbandingan realisasi dan capaian kinerja tahun 2021 dengan tahun 2020 dan tahun 2019 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.2
Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan Tahun 2019

N O	SASARAN STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2019			TAHUN 2020			TAHUN 2021		
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
2021											
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	0	0	0	0	0	0	1,5%	0,4	25,8%
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern / Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	0	0	0	0	0	0	64%	86,43	135%
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks Bangga	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020											
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif	0	0	0	78,80	80,16	101%	0	0	0
		Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	0	0	0	2,13	1,5	70%	0	0	0

		Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama	0	0	0	22,98	22	95,7%	0	0	0
		Presentase Keluarga Yang didata	0	0	0	100	100	100%	0	0	0
		Presentase PPKBD	0	0	0	115	115	100%	0	0	0
		Presentase Layanan Terhadap Remaja Tentang Reproduksi Melalui PIK-R	0	0	0	42	82	192%	0	0	0
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Presentase PUS Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB	0	0	0	80	77,7	97,12%	0	0	0
2019											
1	Menurunnya Laju Pertumbuhan Penduduk	Presentase Peserta KB Aktif	79	80,90	102%	0	0	0	0	0	0
		Menurunnya Presentase Angka Kelahiran (TFR)	2,17	1,3	59,9%	0	0	0	0	0	0
		Meningkatnya Median Usia Kawin Pertama	21	22	104%	0	0	0	0	0	0
		Presentase Keluarga Yang didata	100	100	100	0	0	0	0	0	0
		Presentase PPKBD	118	111	94,06%	0	0	0	0	0	0
		Presentase Layanan Terhadap Remaja Tentang Reproduksi Melalui PIK-R	42	68,62	163%	0	0	0	0	0	0
2	Meningkatnya Ketahanan Keluarga	Presentase PUS Anggota Kelompok BKB Yang Ber-KB	79	80,52	101%	0	0	0	0	0	0

Dari tabel diatas dapat dijabarkan perbandingan capaian sasaran dan indikator dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebagai berikut :

Untuk tahun 2019 pada sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator presentase peserta KB aktif dengan target sebesar 79% dengan realisasi 80,90% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 102%. Untuk indikator menurunnya presentase angka kelahiran (TFR) dengan target 2,17% dengan realisasi 1,3 dan capaian untuk indikator ini sebesar 59,9%. Indikator meningkatnya median usia kawin pertama dengan target sebesar 21 dengan realisasi 22 dan capaian indikator ini sebesar 104%. Indikator presentase keluarga yang didata dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian indikator sebesar 100%. Indikator presentase PPKBD dengan target sebesar 118% dan realisasi 111% sehingga capaian indikator sebesar 94,06%. Sementara untuk indikator presentase layanan terhadap remaja tentang reproduksi melalui PIK-R dengan target sebesar 42% dengan realisasi 68,62% dan capaian indikator sebesar 163%.

Untuk sasaran meningkatnya ketahanan keluarga dengan indikator presentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan target sebesar 79% dan realisasi 80,52% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 101%.

Untuk tahun 2020 pada sasaran menurunnya laju pertumbuhan penduduk dengan indikator presentase peserta KB aktif dengan target sebesar 78,80% dengan realisasi 80,16% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 101%. Untuk indikator menurunnya presentase angka kelahiran (TFR) dengan target 2,13% dengan realisasi 1,5 dan capaian untuk indikator ini sebesar 70%.

Indikator meningkatnya median usia kawin pertama dengan target sebesar 22,98 dengan realisasi 22 dan capaian indikator ini sebesar 95,7%. Indikator presentase keluarga yang didata dengan target sebesar 100% dengan realisasi 100% dan capaian indikator sebesar 100%. Indikator presentase PPKBD dengan target sebesar 115% dan realisasi 115% sehingga capaian indikator sebesar 100%. Sementara untuk indikator presentase layanan terhadap remaja tentang reproduksi melalui PIK-R dengan target sebesar 42% dengan realisasi 82% dan capaian indikator sebesar 192%.

Untuk sasaran meningkatnya ketahanan keluarga dengan indikator presentase PUS anggota kelompok BKB yang ber-KB dengan target sebesar 80% dan realisasi 77,7% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 101%.

Untuk Tahun 2021 pada sasaran menurunnya angka kelahiran dengan indikator laju pertumbuhan penduduk, target sebesar 1,5% dengan realisasi sebesar 0,4% dan capaian indikator ini sebesar 25,8%. Sasaran meningkatnya angka prevalensi pemakaian kontrasepsi modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR) yang targetnya sebesar 64% dan realisasi sebesar 86,43% sehingga capaian untuk indikator ini sebesar 97,12%.

Untuk sasaran meningkatnya indeks pembangunan keluarga dengan indikator indeks I Bangga untuk tahun ini belum ada target dikarenakan untuk sasaran dan indikator ini baru dilaksanakan dalam Renstra perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021-2023 sehingga untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian sasaran dan indikator ini belum dapat terukur untuk tahun 2021.

Dari indikator tahun 2019 sampai dengan 2020 pada tabel III.5 masih mengacu pada renstra sebelum perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023 dan dapat dijelaskan perbandingan capaian sebagai berikut :

1. Untuk indikator presentase KB aktif selang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 capaian masing-masing pertahun tercapai sesuai target, hal ini dikarenakan capaian PUS untuk menjadi peserta KB aktif meningkat.

2. Untuk indikator menurunnya presentase angka kelahiran (TFR) selang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 capaian masing – masing pertahun tercapai sesuai target, hal ini disebabkan untuk angka kelahiran atau Total Fertility Rate (TFR) adalah mengidentifikasi rata-rata jumlah anak yang dilahirkan oleh seorang wanita subur disuatu wilayah daerah tertentu. Pada tabel diatas menyebutkan TFR Kota Kotamobagu untuk tahun 2019 dengan target 2,17 dan realisasi 1,3 anak selama masa usia subur artinya setiap wanita di Kota Kotamobagu memiliki 1-3 anak selama masa usia subur. Begitupun tahun 2020 dengan target dan realisasi anak selama masa usia subur artinya setiap wanita memiliki anak selama masa usia subur. Ini menunjukkan angka keberhasilan TFR di Kota Kotamobagu tercapai.
3. Untuk indikator meningkatnya median usia kawin pertama adalah umur dimana 50% dari semua wanita atau pria dalam kelompok umur sudah melakukan perkawinan. Selang waktu tahun 2019 dan tahun 2020 capaian masing – masing pertahun tercapai sesuai target, ini dikarenakan untuk tahun 2019 dengan target usia 21 tahun dengan realisasi usia 22 Tahun, sementara untuk tahun 2020 target usia 21 tahun dengan realisasi usia tahun. Hal ini menunjukkan capaian untuk indikator ini tercapai di tahun 2019 dan tahun 2020.
4. Untuk Indikator presentase keluarga yang didata selang waktu tahun 2019 tercapai sesuai target karena adanya pendataan keluarga sementara untuk tahun 2020 tidak tercapai karena adanya pandemi Covid-19 sehingga tidak dilakukan pendataan keluarga.
5. Untuk indikator presentase PPKBD selang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 capaian masing – masing pertahun tercapai sesuai target hal ini dikarenakan untuk Kelurahan dan Desa disetiap Kecamatan di Kota Kotamobagu terdapat kader PPKBD dan Sub PPKBD.
6. Untuk indikator presentase layanan terhadap remaja tentang reproduksi melalui PIK-R selang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 capaian masing – masing pertahun tercapai sesuai target. Ini dikarenakan telah terbentuknya kelompok Pusat Informasi Konseiling Remaja (PIK-R) jalur pendidikan dan terpilihnya duta Genre sebagai motivator terbentuknya Duta Genre
7. Untuk indikator presentase PUS anggota BKB yang ber-KB selang waktu tahun 2019 sampai tahun 2020 masing – masing petahun tercapai sesuai target, karena tersedianya sarana Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Bina Keluarga Balita (BKB) KIT yaitu seperangkat alat permainan edukatif dan media berisi materi untuk meningkatkan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang balita, Posyandu, kelompok bermain dan PAUD.

Indikator Tahun 2021 pada tabel III.5 mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019 – 2023, dengan capaian dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) tahun 2021 tercapai sesuai target, hal ini dikarenakan menurunnya presentase angka kelahiran diusia 15-49 tahun (TFR) dan angka kelahiran diusia 15-19 tahun (ASFR) dikota kotamobagu sehingga menekan laju pertumbuhan penduduk di Kota Kotamobagu dimana untuk formu jumlah penduduk kota kotamobagu diawal tahun 2021 sebesar 123.498 + (jumlah kelahiran = 1.855 – jumlah kematian = 1.213) + (Imigrasi = 1049 – emigrasi = 1.197 dibagi jumlah penduduk di akhir tahun sebesar 123.992 dikali 100% sehingga capaian untuk tahun 2021 sebesar 0,4% sesuai target yang diperjanjikan.
2. Untuk indikator presentase pemakaian kontrasepsi tahun 2021 tercapai sesuai target, hal ini disebabkan meningkatnya jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) yang menjadi peserta KB aktif modern

3. Untuk Indikator meningkatnya i Bangga tahun 2021 belum ada target dan realisasi hal ini disebabkan untuk indikator ini baru ditetapkan pada Renstra Perubahan Tahun 2019 - 2023 dan penetapan tersebut didasarkan pada hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap pencapaian Indikator Pemerintah Daerah. Sehingga untuk mengukur keberhasilan dan pencapaian indikator ini belum dapat terukur untuk tahun 2021.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2021 Dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis (RENSTRA).

Adapun perbandingan realisasi Tahun 2021 dengan target akhir Renstra dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.3
Perbandingan Realisasi Indikator Sasaran Tahun 2021 dengan Target Akhir Renstra

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN 2021 TERHADAP TARGET AKHIR 2023
			REALISASI	TAHUN 2023	
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Perumbuhan Penduduk	0,4 %	1,45	0,08
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Pravalence Rate (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	86,43	70%	172,86%
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeks I Bangga	0	Nilai 65	0

Pada tabel diatas pencapaian tahun 2021 terhadap target akhir Renstra 2023 sebagaimana dalam Renstra tercapai yaitu capaian lebih dari 100%. Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kepesertaan ber-KB melalui melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk, sehingga menurunnya angka kelahiran (TFR) yang dapat menekan laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).
2. Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi melalui pemakaian kontrasepsi modern dimana Dinas Pengendalian Penduduk Kota Kotamobagu melakukan penyuluhan tentang pemakaian kontrasepsi modern dan melaksanakan pelayanan KB gratis melalui faskes-faskes disetiap Kecamatan yang bekerjasama dengan Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu.
3. Membentuk kelompok Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS), Kelompok Ketahanan Keluarga, Kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang beranggotakan Pasangan Usia Subur(PUS) peserta KB, Kelompok Tribina, Kelompok BKB,BKR,BKL dan membentuk kelompok PIK-R jalur penddikan disekolah-sekolah serta PIK-R jalur kemasyarakatan dan forum Genre. Sehingga program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera dapat tercapai melalui peran serta organisasi kemasyarakatan dalam membangun keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

3.1.4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.

Pada analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, dapat dianalisis sebagai berikut :

A. Sasaran pertama adalah Menurunnya Angka Kelahiran

Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada tahun 2021 indikator Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) telah sesuai dengan program RKPD dengan realisasi 0,08 % atau tercapai.

1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini :
 - a. Faktor-faktor pendorong yang mempengaruhi keberhasilan ini adalah pelaksanaan advokasi dan koordinasi dibidang pengendalian penduduk dan KB serta menyelenggarakan KIE dibidang KKB, sehingga adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya jumlah dan kualitas anak yang tepat, tingkat kesehatan yang diawali dengan angka harapan hidup dan penggunaan alat kontrasepsi bagi wanita usia 15-49 tahun yang berstatus kawin. Upaya ini dicapai dengan meningkatkan capaian pemakaian kontrasepsi modern (MCPR). Menurunnya kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (Unmet Need) yang menyebabkan menurunnya angka kelahiran dikelompok umur remaja 15-19 tahun (ASFR) dan menurunnya tingkat kehamilan yang tidak diinginkan dikalangan perempuan usia subur.

Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Memenuhi kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, mengadakan pelayanan KB secara gratis serta terus menghimbau pentingnya ber-KB terutama bagi keluarga muda yang baru menikah untuk merencanakan periode memiliki anak, memperhatikan jarak antara kelahiran dan waktu yang tepat untuk memiliki anak. Hal ini dapat menurunkan angka kelahiran diusia 15-49 tahun (TFR).
- b. Adanya kerjasama dengan stakeholder yang terkait serta dukungan Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat tentang pentingnya pemakaian alat kontrasepsi KB

B. Sasaran kedua adalah Meningkatkan Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern /Modern Contraceptive Prravalence Rate (MCPR)

Berdasarkan hasil analisis kinerja pada tahun 2021 indikator Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern dengan realisasi 172,86 % atau tercapai

1. Faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :
 - a. Meningkatnya kepesertaan ber-KB melalui pemakaian kontrasepsi modern dengan dilaksanakannya pelayanan KB gratis dan penyuluhan pentingnya ber-KB dengan menggunakan metode kontrasepsi modern guna meningkatkan kualitas kesehatan reproduksi, dibandingkan dengan penggunaan metode KB tradisional.
 - b. Tersedianya alokasi dan mobil pelayanan gratis, faskes pemerintah yang bekerjasama dengan BPJS serta fasilitas yang terjangkau.

Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini :

- a. Meningkatkan penggunaan KB pasca persalinan merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan Contraceptive Prevalence Rate (CPR) atau tingkat penggunaan kontrasepsi dan menurunkan unmet need atau kebutuhan KB yang tidak terpenuhi sehingga peluang terhadap angka kematian ibu akibat kehamilan yang tidak diinginkan berkurang.
- b. Setiap Pasangan Usia Subur (PUS) yang mendapatkan pelayanan KB pasca persalinan lebih diarahkan pada Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP), agar dapat menjarakkan kehamilan.
- c. Perlu adanya sumberdaya seperti ketersediaan tenaga kesehatan yang kompeten, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai serta ketersediaan alat dan obat kontrasepsi.

C. Sasaran ketiga adalah Meningkatnya Indeks iBangga

Berdasarkan hasil analisis kinerja bahwa pada tahun 2021 untuk indikator indeks iBangga belum ada capaian dikarenakan untuk sasaran dan indikator ini baru ditetapkan pada tahun 2021 pada Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019-2023, berdasarkan hasil evaluasi Kemenpan RB terhadap pencapaian indikator Pemerintah Daerah.

Akan tetapi faktor pendorong keberhasilan pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Meningkatkan ketahanan keluarga guna mewujudkan keluarga berkualitas dan sejahtera. Untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan sejahtera maka Dinas PP dan KB melalui program pemberdayaan dan peningkatan keluarga sejahtera meningkatkan ketahanan keluarga melalui pemanfaatan kelompok Tribina dan UPPKS dalam pembinaan kemandirian ber-KB.
- b. Peningkatan akses informasi, pendidikan, penyuluhan dan pelayanan tentang pengasuhan dan perkembangan balita, remaja dan lansia melalui kelompok BKB, BKR dan BKL
- c. Peningkatan kualitas remaja dan pemberian akses informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan tentang kehidupan berkeluarga melalui kelompok PIK-R dan forum Genre.

Alternatif dan solusi dalam pencapaian sasaran ini adalah :

- a. Pembentukan kelompok Tribina dan UPPKS di desa dan kelurahan setiap Kecamatan serta adanya dukungan dan kerjasama dengan Tokoh Agama (TOGA), Tokoh Masyarakat (TOMA), Tokoh Adat (TODA) dan tim medis.
- b. Tersedianya sarana KIE BKB KIT, KIE BKL KIT, posyandu balita dan lansia, kelompok bermain dan PAUD.
- c. Terbentuknya Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) baik lewat jalur kemasyarakatan maupun jalur pendidikan dan terbentuknya wadah forum Genre.

3.1.5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Adapun analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel III.4
Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET			REALISASI			CAPAIAN		
			Indikator	Anggaran	SD M	Indikator	Anggaran	SD M	Indikator	Anggaran	SDM
1	Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,45 %	120.925.400	4 Orng	0,4 %	115.002.800	4 Orng	0,08 %	95,10%	100 %
2	Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCPR)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	70%	2.227.048.990	4 Orng	86,43%	1.910.557.088	4 Orng	172,86%	85,78%	100 %
3	Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeksi Bangga	0	30.135.000	5 Orng	0	30.135.000	5 Orng	0	100%	100 %

Sumber Data : SIPD dan Daftar Nominatif Pegawai Dinas PP dan KB Kotamobagu Tahun 2021

Pada tabel diatas analisis efisiensi sumber daya dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Untuk mendukung pencapaian indikator sasaran Laju Pertumbuhan Penduduk, dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia ini telah tercapai, dilihat dari capaian indikator kinerja sebesar 0,08% , dibandingkan capaian realisasi anggaran 95.10% atau rasio efisiensi 4,9%. Pada Indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja dimana kegiatan tersebut terdapat efisiensi pada belanja barang dan jasa, belanja alat/bahan kegiatan kantor, belanja mami dan belanja tenaga administrasi. Dengan adanya efisiensi anggaran, pelaksanaan kegiatan tetap berjalan baik sehingga mendukung capaian indikator sasaran. Tercapainya indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada di Bidang Pengendalian Penduduk dan Sekretariat.

2. Untuk pencapaian indikator sasaran Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern. Dari sisi penggunaan sumber daya keuangan dan manusia telah tercapai. Untuk capaian indikator kinerja sebesar 172,86% lebih tinggi dibandingkan capaian realisasi anggaran 85,78% atau rasio efisiensi 14,22%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja bersumber dari Dana Alokasi Khusus Non Fisik (BOKB) dan Dana Alokasi Khusus Fisik. Sementara untuk dana yang bersumber dari DAU ada beberapa kegiatan yang mempengaruhi capaian kinerja, walaupun kegiatan tersebut terdapat efisiensi pada belanja ATK, belanja makan minum, bahan cetak dan honorarium narasumber. Dengan efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan tetap berjalan dengan baik sehingga mendukung capaian indikator. Untuk mencapai indikator sasaran ini didukung sumber daya yang ada dibidang Pembinaan Keluarga Berencana serta Sekretariat.

3. Untuk indikator sasaran Indeks iBangga pada tahun 2021 belum ada capaian realisasi dikarenakan indikator sasaran ini mengacu pada Renstra Perubahan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019 – 2023. Akan tetapi untuk penggunaan sumber daya keuangan dan manusia telah tercapai, dimana capaian realisasi anggaran sebesar 100%. Pada indikator kinerja ini ada beberapa kegiatan yang terdapat efisiensi yaitu pada belanja barang dan jasa, belanja makan dan minum serta belanja honorarium dan nara sumber.

Untuk mencapai indikator sasaran ini sumber daya yang ada di bidang Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera serta Sekretariat.

3.1.6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja.

Pencapaian program, kegiatan, sub kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu secara umum telah menunjang pencapaian indikator kinerja. Dengan penjelasan pencapaian sebagai berikut :

- a. Pencapaian kinerja dengan indikator Laju Pertumbuhan Penduduk didukung dengan beberapa kegiatan sebagai berikut :
1. Kegiatan Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk.
 2. Kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan diatas sebagai berikut :

1. Dukungan sejumlah perangkat daerah dalam penyusunan dan pemanfaatan Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat Kabupaten/Kota.
 2. Jumlah dokumen profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga, jumlah laporan realisasi pelaksanaan pelayanan oleh faskes dan jejaringnya serta jumlah informasi data mikro.
- b. Pencapaian kinerja dengan indikator Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern didukung dengan beberapa kegiatan berikut :
1. Kegiatan Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal.
 2. Kegiatan Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB).
 3. Kegiatan Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah :

1. Pengelolaan operasional di sejumlah balai pelayanan KB
 2. Jumlah sarana pendukung yang tersedia di balai KB dan Gudang
 3. Jumlah alat dan obat kontrasepsi MOP dan MOW serta jumlah PUS /Akseptor yang terlayani pada kegiatan konseling KB dan pemasangan alat kontrasepsi.
- c. Pencapaian kinerja dengan indikator Indeks iBangga didukung dengan beberapa kegiatan berikut:
1. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Hasil dari pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Dukungan terhadap kelompok Tribina dan UPPKS berupa sosialisasi, monitoring dan evaluasi kegiatan.
2. Adanya Pusat Konseling Remaja (PIK-R) lewat jalur Pendidikan dan masyarakat serta Forum Genre

Tabel III.5
Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

SASARAN				PROGRAM					KEGIATAN					SUB KEGIATAN				
URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	SATUAN	REALISASI	URAIAN	INDIKATOR	TARGET	SATUAN	REALISASI
Menurunnya Angka Kelahiran	Laju Pertumbuhan Penduduk	1,55%	0,45	Pengendalian Penduduk	Menurunnya Rata - Rata Jumlah Anak Dalam Keluarga	2,1	Rata-Rata	1,8	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Meningkatnya Pemanduan dan Sinkronisasi Dalam Rangka Pelaksanaan Pengendalian Kuantitas Penduduk	45	%		Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah Yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Penendalian Penduduk	15 OPD	Jumlah	
									Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Pengelolaan Data dan Informasi	80	%		Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	Jumlah Dokumen Profil Kependudukan	1 Dokumen	Jumlah	
									Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK									

									Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan									
Meningkatnya Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive Prevalence Rate (MCP R)	Presentase Pemakaian Kontrasepsi Modern	64 %	86,43	Pembinaan Keluarga Berencana	Presentase Tingkat Keberhasilan Pemakaian Kontrasepsi	75	%	86,8	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Presentase Peserta KB Aktif	85	%		Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Jumlah Balai Yang Terlayani Operasional	4 Balai	Jumlah	4 Balai
									Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Presentase Peserta KB Aktif	85	%		Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	Jumlah Balai/Gudang Yang Menerima Pendukung Operasional	4 Balai / 1 Gudang	Jumlah	4 Balai / 1 Gudang
									Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan	Presentase Penggunaan	80	%		Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan	Jumlah Alokasi MOP, MOW dan	35	Unit	35 Unit

									Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Alat Kontrasepsi					KB	MKJP			
														Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	Jumlah Yang Terlayani Pada Kegiatan Konseling KB dan Pemasyarakatan Kontrasepsi KB	906	PUS/Akseptor		
Meningkatnya Indeks Pembangunan Keluarga	Indeksi Bangga	0	0	Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Presensi Anggota Kelompok Yang Ber-KB	68,5	%	91,89	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Kelompok Tribina, PIK-R dan UPPKS	57 Kelompok Tribina, 40 UPPKS dan 50 PIK-R	Jumlah	57 Kelompok Tribina, 40 UPPKS dan 50 PIK-R	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	Jumlah anggota Kelompok Tribina/ UPPKS yang disosialisasi		Org		

3.2 Realisasi Anggaran

Pagu anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021 sebesar Rp. dengan realisasi sebesar Rp. atau %.

Untuk rincian anggaran per program/kegiatan /sub kegiatan dapat dijelaskan pada tabel III.9 (Target dan Realisasi Anggaran Belanja Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana). Denganuraian belanja tidak langsung dan belanja langsung sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung Pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 dialokasikan untuk belanja gaji dan tunjangan dengan anggaran sebesar Rp. 2.080.091.467,00 dan realisasi sebesar Rp. 2.074.724.782,00 atau 99,74%.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 dianggarkan sebesar Rp. 2.704.869.315,00 dengan capaian realisasi sebesar Rp. 2.341.959.485,00 atau 86,58%.

Tabel III.6
Target dan Realisasi Anggaran Tahun 2021 Dinas PP dan KB

NO	Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	Capaian (%)
I	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
a	Administrasi Keuangan Perangkat	2.080.091.467,00	2.074.724.782,00	(5.366.685)	99,74
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.080.091.467,00	2.074.724.782,00	(5.366.685)	99,74
	Administrasi Umum Perangkat	131.609.925,00	130.473.250,00	(1.136.675)	99,14
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor	2.268.625,00	2.268.500,00	(125)	99,99
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	18.152.600,00	18.140.350,00	(12.250)	99,93

3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.597.700,00	16.561.400,00	(36.300)	99,79
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.975.000,00	15.660.000,00	(315.000)	98,03
5	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	78.616.000,00	77.843.000,00	(773.000)	99,02
b	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100.520.000,00	76.321.000,00	(24.199.000)	75,93
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.000.000,00	2.000.000,00	(0.00)	100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	29.520.000,00	14.881.000,00	(14.639.000)	50,41
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum	69.000.000,00	59.440.000,00	(9.560.000)	86,14
c	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	94.630.000,00	79.470.347,00	(15.159.653)	83,98
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.980.000,00	31.332.724,00	(11.6470276)	72,90
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	47.430.000,00	44.331.623,00	(3.098.377)	93,47
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	4.220.000,00	3.806.000,00	(414.000)	90,19

II	Program Pengendalian Penduduk	120.925.400,00	115.002.800,00	(5.922.600)	95,10
a	Pemanduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	25.496.400,00	24.876.400,00	(612.000)	97,57
1	Penyusunan dan Pemanfaatan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) Tingkat Kabupaten/Kota	9.646.400,00	9.526.400,00	(120.000)	98,76
b	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	95.429.000,00	65.126.400,00	(5.302.600)	94,44
1	Penyusunan Profil Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga	31.016.400,00	31.016.400,00	(140.600)	100
2	Pelaksanaan Rapat Pengendalian Program KKBPK	15.850.000,00	15.350.000,00	(500.000)	96,85
3	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan	64.412.600,00	59.110.000,00	(5.302.600)	91,77

III	Program Pembinaan Keluarga Berencana	2.227.048.990,00	1.910.557.088,00	(316.491.902)	85,78
a	Pelaksanaan Advokasi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.024.560.000,00	897.410.500,00	(127.149.500)	87,59
1	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	1.024.560.000,00	897.410.500,00	(127.149.500)	87,59
b	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB / Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	770.500.000,00	763.042.600,00	(7.457.400)	99,03
1	Penyediaan Sarana Pendukung Operasional PKB/PLKB	770.500.000,00	763.042.600,00	(7.457.400)	99,03
c	Pengendalian dan pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	431.988.990,00	250.103.988,00	(181.885.002)	57,90
1	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB	279.500.000,00	99.567.500,00	(179.932.500)	35,62
2	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	152.488.990,00	150.536.488,00	(1.952.502)	98,72
IV	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	30.135.000,00	30.135.000,00	(0.00)	100

a	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	30.135.000,00	30.135.000,00	(0,00)	100
1	Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR< BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga /UPPKS)	30.135.000,00	30.135.000,00	(0,00)	100

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2021 ini merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu sesuai dengan visi dan misi.

Berdasarkan pengukuran kinerja terhadap sasaran, sebagian besar target kinerja sudah tercapai. Pencapaian kinerja Tahun 2021 merupakan tahun ketiga yang ingin diwujudkan sesuai dengan Perubahan Renstra Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu Tahun 2019 - 2023. Dari hasil menunjukkan bahwa kinerja dalam pencapaian sasaran pada tahun 2021 telah dilaksanakan dengan baik yaitu dan tercapai, dengan capaian kinerja tahun 2021 sebagai berikut :

1. Berdasarkan penetapan target Tahun 2021 dari 3 (Tiga) Indikator Kinerja Utama (IKU) yang capainnya sesuai target
2. Pada Tahun 2021 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu melakukan perubahan Renstra Tahun 2019 - 2023 sehingga IKU bisa terlaksana sesuai target.

Capaian kinerja selama Tahun 2021 didukung dengan anggaran sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2021.

Keberhasilan pencapaian target didukung oleh beberapa faktor sebagai berikut :

1. Komitmen dan dukungan pimpinan dalam memberikan respon dan tanggapan yang baik bersifat inovatif dan memaksimalkan potensi - potensi dan sumber daya yang ada.
2. Adanya monitoring dan evaluasi terhadap tindak lanjut hasil dari laporan PPKB dan Sub PPKB di Desa dan Kelurahan setiap Kecamatan.
3. Meningkatkan koordinasi dengan kerjasama dengan OPD terkait, Fasilitas - Fasilitas Kesehatan (FASKES), Sekolah-sekolah formal dan informal yang bekerjasama dalam bidang kependudukan, Pembentukan Kelompok PIK-R dan Forum Genre, Tokoh Masyarakat (TOMA), Toko Agama (TOGA), Tokoh Adat (TODA) serta kelompok UPPKA dan UPPKS guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kesehatan reproduksi melalui keikutsertaan dalam ber-KB sebagai upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan perwujudan keluarga berkualitas.

Dalam pencapaian kinerja sesuai Perjanjian Kinerja, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dan solusi yang telah dilaksanakan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian sasaran yaitu :

1. Terdapat efisiensi anggaran pada program dan kegiatan akibat terdampak pandemi Covid -1.
2. Adanya pembatasan kegiatan sehingga ada beberapa kegiatan yang mengumpulkan banyak orang tidak dilaksanakan secara keseluruhan.

Dalam mengatasi permasalahan diatas, beberapa solusi yang telah di tempuh oleh Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Kotamobagu yaitu berkoordinasi dengan PKB, PLKB, PPKBD dan Sub PPKBD untuk melaksanakan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga dan penyuluhan advokasi dan pergerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana.

4.2 Strategi Pemecahan Masalah

Dalam rangka mewujudkan sasaran dan kegiatan yang belum tercapai maka untuk masa yang akan datang perlu ditempuh langkah - langkah yang konkrit untuk pencapaian kinerja. Rencana Aksi yang dilakukan antara lain :

1. Meningkatkan pelayanan prima di bidang keluarga berencana dengan target menurunkan angka kelahiran (TFR).
2. Penurunan angka pemenuhan KB yang tidak terlayani (unmetneed) dan peningkatan capaian peserta KB modern (CPR)
3. Peningkatan kesejahteraan keluarga dengan pembinaan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dan ketahanan keluarga melalui kelompok Tribina (BKB, BKR dan BKL)

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2021. Laporan Ini masih sangat jauh diharapkan, namun setidaknya dapat dijadikan gambaran untuk melihat kinerja Dinas PP dan KB Kota Kotamobagu di tahun 2021. Akhirnya kami berharap LKjIP ini semoga bermanfaat bagi kemajuan Kota Kotamobagu menuju Kotamobagu sebagai Kota Jasa dan Perdagangan berbasis Kebudayaan Lokal menuju masyarakat yang sejahtera dan berdaya saing.